HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Taman Mahkota Mutiara Blok A1 No. 22
Jl. Husein Sastranegara, Benda - Tangerang
Telp. (021) - 5438 1726
Fax.(021) - 5438 1729
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT. AGRO MULTI PERSADA

NOMOR : - 9 -
TANGGAL : 07 Mei 2008

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 9.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Mei dua ribu --- delapan (07-05-2008) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu -- Indonesia Barat).----------

- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,** -- **Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,** Notaris di --- Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- **Nyonya KRISTANTI RIYANTI, Sarjana Hukum, Magister** -- **Hukum,** lahir di Depok, pada tanggal lima belas ------- Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan -- (15-12-1979), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -- Jalan Delman Kencana III/6, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.551279.0252, Warga Negara ----- Indonesia.----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang -- akan disebutkan dibawah ini dan termuat dalam -------- Keputusan Pemegang Saham **PT. AGRO MULTI PERSADA,** yang akan disebut.----------

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--------

- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas - menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :---------

HUMBERG LIE SH.SE.MKn NOTARIS TANGERANG

- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham **PT. AGRO MULTI PERSADA**, tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu delapan (29-04-2008), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut "Keputusan ------ Sirkular Pemegang Saham"), yang aslinya dilekatkan --- pada minuta akta ini, perseroan terbatas **PT. AGRO** ---- **MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :-------

- Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu lima -- (18-07-2005) nomor 30, yang dibuat dihadapan ------- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Notaris di Jakarta dan telah mendapat Pengesahan -- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima (27-07-2005) nomor - C-20748 HT.01.01.TH.2005.----------
- Akta tertanggal sebelas Agustus dua ribu lima (11-- 08-2005) nomor 29, yang dibuat dihadapan DARMAWAN - TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris ------ tersebut dan telah mendapat Persetujuan dari ------- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal --- sembilan belas Agustus dua ribu lima (19-08-2005) - nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005.----------
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu -- lima (21-12-2005) nomor 27, yang dibuat dihadapan - DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan ------ Perubahan Direksi/Komisarisnya telah diterima dan -

Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang – nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, –– yang untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan –– berbunyi dan ditulis sebagai berikut :————————

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. AGRO MULTI PERSADA**" (selanjutnya cukup disingkat dengan – "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta ———— Selatan.————————————————————
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ——— kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ———— ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan –– dari seorang anggota Komisaris.————————

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ——— terbatas.————————————————————

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha ——— dalam bidang perdagangan, industri, ———— transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa - dibidang hukum dan pajak).————————————
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ——— diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan –– usaha sebagai berikut :————————————
   a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan

dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat ------ Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -- Suratnya tertanggal dua puluh enam Desember dua --- ribu lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18838.------

- bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar -- Perseroan, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum --- Pemegang Saham.----------

- bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat - dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh - penghadap dalam akta ini.----------

- bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas - ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan Sirkular - Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara dibawah -- tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini.----------

- sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -------- sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa ---- dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang --------- dimaksudkan diatas telah diambil keputusan sebagai --- berikut :----------

1. Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar --

dari segala macam barang yang dapat ---------
diperdagangkan antara lain meliputi ---------
perdagangan impor dan ekspor hasil ----------
perkebunan antara lain karet, cengkeh, -------
kopra, sawit, coklat, palawija, kelapa, -----
perdagangan peralatan dan bahan serta hasil -
pertanian dan perkebunan, antar pulau/daerah
(interinsulair) dan lokal, baik dengan -------
perhitungan sendiri maupun dengan ----------
perhitungan pihak lain secara komisi untuk --
barang-barang hasil produksi sendiri dan ----
hasil produksi perusahaan lain, serta -------
bertindak sebagai agen, leveransir, ---------
supplier, waralaba, distributor dari badan--
badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari -
dalam maupun luar negeri.----------

b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang ---
meliputi industri pertanian, industri hulu --
dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan -
dan holtikultura serta memasarkan hasil-------
hasilnya.----------

c. Menjalankan usaha dibidang transportasi -----
angkutan hasil perkebunan dan pertanian.-----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, -
termasuk agroindustri yang meliputi budidaya
dan pengolahan pasca panen, pembibitan, -----
industri pertanian, agrobisnis, peternakan, -
perkebunan, perikanan darat/laut dan --------
kehutanan.----------

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

M O D A L

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham, yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ---- penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --- maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.----------

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 - (empat belas) hari tersebut, ternyata masih -- ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.----------

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -- adalah Saham atas nama.----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau - badan hukum Indonesia.----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ----- saham.----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -- saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----- setiap surat saham diberi sehelai surat ------ saham.----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektif saham;
   c. nomor surat saham dan jumlah saham;
   d. nilai nominal saham;
   e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS

berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi tentang

penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
   a. RUPS Tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
   a. Direksi menyampaikan :
      - laporan tahunan yang telah ditelaah

oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ----
persetujuan RUPS;----------

- laporan keuangan untuk mendapat --------
pengesahan rapat;----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.---------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -- telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.---

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan --- laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -- Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan - tindakan pengawasan yang telah dijalankan ---- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan - tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan - Laporan Keuangan.----------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata - acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-------

-------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-------

----------PASAL 9----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.--

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan --------

pemanggilan terlebih dahulu kepada para ------- pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.----------

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.---------

4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.----------

5. Jika Presiden Direktur tidak ada atau --------- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.---------

6. Jika Wakil Presiden Direktur tidak ada atau -- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ---- ditunjuk oleh Presiden Direktur atau Wakil --- Presiden Direktur.----------

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau ---------- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ---- Komisaris.----------

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh - dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.---

-------KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS-------

PASAL 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya satu anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
   c. meninggal dunia;
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
   b. mengikat perseroan sebagai penjamin;
   c. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan Perseroan;
   d. memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan;
   e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

   - harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -

lainnya berhak dan berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili - Perseroan.----------

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :---------
   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau - lebih anggota Dewan Komisaris; atau---------
   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas - nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ------ Anggaran Dasar ini.----------
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan --- surat tercatat atau dengan surat yang --------- disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Direksi dengan mendapat tanda terima paling -- lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----------
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ------
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi -
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ------
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.---

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam - Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ------ lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Direksi - hadir atau diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil --------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

10. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----- setuju paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam rapat.----------

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ------ setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi --- yang akan menentukan.----------

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir

apabila :

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan

sementara kepada seorang atau lebih diantara – anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar – ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan – Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat – (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 – (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung – sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku – seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan – memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup

kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---
lain.---

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan -- agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ------- keperluan Perseroan.---

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud -- pada ayat (2) yang penggunaannya belum -------- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh ------ Direksi dengan cara yang tepat menurut -------- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ------ persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh - laba.---

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ------ RUPS.---

- Akhirnya, penghadap bertindak dalam ---------- kedudukannya sebagaimana tersebut di atas --------- menerangkan bahwa :---

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ---- 19.000.000 (sembilan belas juta) saham atau -- seluruhnya dengan nilai nominal ---------- Rp.19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar --

Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham :-------

a. Perseroan Terbatas **PT. TRI NUR CAKRAWALA**, - berkedudukan di Jakarta, yang anggaran --- dasar dan perubahan-perubahannya termuat - dalam :----------

- Berita Negara Republik Indonesia, ------ tertanggal delapan Agustus seribu ------ sembilan ratus delapan puluh (08-08----- 1980) nomor 64 Tambahan nomor 505.------
- Berita Negara Republik Indonesia, ------ tertanggal dua belas Pebruari seribu --- sembilan ratus sembilan puluh tiga (12-- 02-1993) nomor 13 Tambahan Berita ------ Negara nomor 695.----------
- Berita Negara Republik Indonesia, ------ tertanggal dua belas Pebruari seribu --- sembilan ratus sembilan puluh tiga (12-- 02-1993) nomor 13 Tambahan Berita ------ Negara nomor 696.----------
- Berita Negara Republik Indonesia, ------ tertanggal dua puluh empat Juli seribu - sembilan ratus sembilan puluh delapan -- (24-07-1998) nomor 59 Tambahan Berita -- Negara nomor 4153.----------
- Berita Negara Republik Indonesia, ------ tertanggal dua puluh satu September dua ribu satu (21-09-2001) nomor 76 -------- Tambahan Berita Negara nomor 6042.------
- Akta tertanggal dua puluh tiga Desember

dua ribu tiga (23-12-2003) nomor 24, ---
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ---
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris
tersebut dan telah mendapat Persetujuan
dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal tiga -----
belas Pebruari dua ribu empat (13-02-----
2004) nomor C-03607 HT.01.04.TH.2004.---

- Akta tertanggal delapan Nopember dua ---
ribu empat (08-11-2004) nomor 13, yang -
dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris --------
tersebut, yang telah diberitahukan -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia Direktorat --
Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----
dengan Suratnya tertanggal sebelas -----
Nopember dua ribu empat (11-11-2004) ---
nomor C-UM.02.01.14004.----------

selaku pemegang dari 35 % (tiga puluh lima
persen) atau sebanyak 6.650.000 (enam juta
enam ratus lima puluh ribu) saham dalam --
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar enam milyar enam ratus lima puluh -
juta Rupiah.....Rp.6.650.000.000,00-

b. Perseroan Terbatas **PT. DAYA ADIRA MUSTIKA,**
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran ---
dasar dan perubahan-perubahannya termuat -

dalam :----------

- Akta tertanggal dua April seribu -------
  sembilan ratus delapan puluh empat (02-
  04-1984) nomor 1, yang dibuat dihadapan
  Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris -
  di Bandung dan telah mendapat ----------
  Pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
  Republik Indonesia, dengan Surat ------
  Keputusannya tertanggal lima belas -----
  Agustus seribu sembilan ratus delapan --
  puluh empat (15-08-1984) nomor C2------
  4609.HT.01.01.TH.1984.----------
- Berita Negara Republik Indonesia, -----
  tertanggal satu April dua ribu tiga ----
  (01-04-2003) nomor 26 Tambahan Berita --
  Negara nomor 2565.----------
- Akta tertanggal satu Nopember dua ribu -
  empat (01-11-2004) nomor 9, yang telah -
  dilaporkan kepada Direktorat Jenderal --
  Administrasi Hukum Umum, Departemen ----
  Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
  Republik Indonesia, dengan Suratnya ----
  tertanggal tujuh Desember dua ribu -----
  empat (07-12-2004) nomor C-29578 -------
  HT.01.04.TH.2004.----------
- Akta tertanggal dua puluh Desember dua -
  ribu empat (20-12-2004) nomor 15, yang -
  telah dilaporkan kepada Direktorat -----
  Jenderal Administrasi Hukum Umum -------

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, dengan suratnya ---- tertanggal dua puluh Januari dua ribu -- lima (20-01-2005) nomor C-01704 -------- HT.01.04.TH.2005.----------

selaku pemegang dari 32,5 % (tiga puluh -- dua koma lima persen) atau sebanyak ------- 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh - lima ribu) saham dalam Perseroan, dengan - nilai nominal seluruhnya sebesar enam ---- milyar seratus tujuh puluh lima juta ------ Rupiah.....Rp.6.175.000.000,00--

c. Perseroan Terbatas **PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**, berkedudukan di Jakarta, yang ------- anggaran dasar dan perubahan-perubahannya - termuat dalam :----------

- Akta tertanggal lima belas Oktober --- seribu sembilan ratus sembilan puluh -- delapan (15-10-1998) nomor 34, yang -- dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI --- HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ------- Pengesahan dari Menteri Kehakiman ---- Republik Indonesia, dengan Surat ------ Keputusannya tertanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan -- puluh sembilan (26-03-1999) nomor C--- 5308 HT.01.01.TH.99 dan telah --------- diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia, tertanggal dua puluh lima —
Agustus dua ribu (25-08-2000) nomor 68
Tambahan Berita Negara nomor 4803.————

- Akta tertanggal tujuh September dua ——
ribu (07-09-2000) nomor 8, yang dibuat
dihadapan Nyonya RUKMASANTI ————————
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris ——
tersebut, yang telah dilaporkan kepada
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ————
Manusia Republik Indonesia, ————————
sebagaimana terbukti dari Laporan ————
Perubahan Anggaran Dasar yang telah ——
diterima dan dicatat dengan surat ————
tertanggal enam Maret dua ribu satu ——
(06-03-2001) nomor C-1566 ——————————
HT.01.04.TH.2001.————————————————

- Akta tertanggal dua puluh tujuh ————
Desember dua ribu empat (27-12-2004) —
nomor 36, yang dibuat dihadapan Nyonya
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut dan Penerimaan ————
Laporan Akta Perubahan Anggaran ————
Dasarnya telah diterima dan dicatat ——
dalam Database Sisminbakum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum ————
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan suratnya ——
tertanggal lima belas Pebruari dua ———
ribu lima (15-02-2005) nomor C-03768 —

HT.01.04.TH.2005.----------

- Akta tertanggal dua puluh Nopember dua ribu tujuh (20-11-2007) nomor 23, yang dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI --- HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris -- tersebut, yang telah mendapatkan ------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ sebagaimana ternyata dalam Surat ------ Keputusannya tertanggal dua puluh ---- delapan Desember dua ribu tujuh (28-- 12-2007) nomor C-07898 HT.01.04 ------ TH.2007.----------

- Akta tertanggal delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) nomor 33, - yang dibuat dihadapan Nyonya ---------- RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat - Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---- dengan Surat Keputusannya tertanggal -- dua puluh delapan Desember dua ribu -- tujuh (28-12-2007) nomor C-07898 ------ HT.01.04-TH.2007 dan Penerimaan ------ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai Pemberitahuan Perubahan ------ Susunan Pengurusanya, telah diterima -- dan dicatat didalam database ---------- Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
dengan Suratnya tertanggal delapan ---
April dua ribu delapan (08-04-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-8242.----------

selaku pemegang dari 32,5 % (tiga puluh --
dua koma lima persen) atau sebanyak -------
6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh -
lima ribu) saham dalam Perseroan, dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar enam ----
milyar seratus tujuh puluh lima juta -----
Rupiah.....Rp.6.175.000.000,00-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 19.000.000 ---
(sembilan belas juta) saham atau seluruhnya ---
dengan nilai nominal Rp.19.000.000.000,00 ----
(sembilan belas milyar Rupiah).----------

2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan adalah sebagai berikut :----------
DIREKSI.----------

- Presiden Direktur : **tuan Insinyur** --------
SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama ----
BENNY SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada --
tanggal lima belas --- Mei seribu sembilan -- ratus empat puluh dua (15-05-1942), swasta, bertempat tinggal di - Jakarta, Jalan Patra -

Kuningan M.4 kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia.

- Direktur : **tuan ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (01-07-1975), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5302.010775.0229, -
Warga Negara ---------
Indonesia.----------

- Direktur : **tuan TODDY MIZAABI** ---
ANTO SUGOTO, lahir di
Sawahlunto, pada ----
tanggal dua puluh ---
tiga Januari seribu --
sembilan ratus tujuh -
puluh enam (23-01-----
1976), swasta, -------
bertempat tinggal di -
Jakarta, Tebet Barat -
Raya kaveling 56, ---
Rukun Tetangga 020, --
Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Tebet -----
Barat, Kecamatan ----
Tebet, Jakarta -------
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk -
nomor ----------
09.5301.230176.7030, -
Warga Negara ---------
Indonesia.----------

DEWAN KOMISARIS.----------

- Presiden Komisaris : **tuan CRESCENTO** -------
HERMAWAN, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal

tiga puluh Januari ---
seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu (30-
01-1971), swasta, ---
bertempat tinggal di -
Jakarta, Patra ------
Kuningan Raya M.4/4-
5, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Kuningan ---
Timur, Kecamatan ----
Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk -
nomor ----------
09.5306.300171.0208, -
Warga Negara ---------
Indonesia.----------

- Komisaris : **tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal
dua Pebruari seribu --
sembilan ratus tujuh -
puluh tiga (02-02---
1973), swasta, ------
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Patra -
Kuningan II I/10-11, -
Rukun Tetangga 006, --

Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Kuningan ---
Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta ---
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk -
nomor ----------
09.5302.020273.0435, -
Warga Negara ---------
Indonesia.----------

2. Memberikan kuasa kepada **nyonya KRISTANTI RIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** untuk menyatakan -- keputusan ini dalam suatu akta otentik serta ----- melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam -- pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan ------- perubahan anggaran dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap pihak manapun juga, melakukan negosiasi dan pembicaraan-pembicaraan -- apapun kepada pihak-pihak manapun, meminta ------- dan/atau memberikan segala keterangan dari ------- dan/atau kepada siapapun juga, membuat dan/atau -- meminta untuk dibuatkan serta menandatangani ----- segala akta, perjanjian, surat dan dokumen-dokumen lainnya berikut segala perubahan dan/atau --------- perpanjangannya, melakukan pembayaran dan menerima tanda terimanya serta tindakan-tindakan lainnya -- yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Direksi - Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan -- yang berlaku dan/atau oleh perjanjian-perjanjian -

yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan – perubahan anggaran dasar tersebut.————————————

3. Mengkonfirmasi bahwa seluruh keputusan yang ——— tercantum dalam surat keputusan ini berlaku ——— efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya – surat keputusan ini. dan————————————————

4. Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 —— ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-——— keputusan yang diambil berdasarkan surat keputusan ini memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu ——— Rapat Umum Pemegang Saham.————————————————

————————————**DEMIKIAN AKTA INI**————————————

– Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ——— Tangerang, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam – kepala akta ini dengan dihadiri oleh :————————————

1. **nona NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada ——— tanggal empat belas April seribu sembilan ratus —— delapan puluh tiga (14-04-1983), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun ——— Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, – Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang ——— Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.540483.0147, —— Warga Negara Indonesia.————————————————

2. **tuan WAHYUDI, Sarjana Hukum**, lahir di Tangerang, – pada tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua (15-07-1982), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor – 7, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan ——

Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk (KTP) nomor 3671091507820003, Warga Negara Indonesia.————————————————————

- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-——— saksi.————————————————————————————

- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ——— kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ——— ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.————————————————————————

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.————————

- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnya.——

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.———

Notaris di Tangerang

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn